

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

LAPORAN KINERJA

BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI
TAHUN 2022

NOMOR OT.04/LPP-1161/SU04/3/2022

TANGGAL 30 DESEMBER 2022



Kata Pengantar



Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Tujuan tersebut dicapai melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan kompetitif. Kini, RPJPN tersebut telah memasuki tahapan keempat yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Setidaknya, terdapat tujuh agenda pembangunan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satunya yaitu memperkuat stabilitas pembangun politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Transformasi pelayanan publik atau dikenal dengan reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Biro Hukum dan Komunikasi menjalankan program dukungan manajemen melalui *protection* dan *branding*. *Protection* diwujudkan dalam tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi hukum dan perundang-undangan. Sedangkan, *branding* diwujudkan dalam tugas melaksanakan komunikasi dan informasi publik.

Tugas dan fungsi yang diemban oleh Biro Hukum dan Komunikasi dituangkan dalam empat sasaran kegiatan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2020 - 2024. Alhamdulillah, capaian kinerja 2022 dari keempat sasaran kegiatan tersebut telah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Kami berharap, Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pendorong untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan yang kami berikan kepada *stakeholders*.

Kepala Biro,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Azwad Zamroddin Hakim

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik.....	iv
Ringkasan Eksekutif.....	v
Bab I Pendahuluan.....	2
A. Tugas dan Fungsi	2
B. Struktur Organisasi.....	2
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan.....	3
2. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum.....	3
3. Bagian Komunikasi dan Informasi	3
4. Kelompok Jabatan Fungsional.....	4
C. Sumber Daya Manusia.....	4
D. Aspek Strategis Organisasi	4
E. Kegiatan dan Layanan	5
F. Sistematika Laporan.....	5
Bab II Perencanaan Kinerja	7
A. Target Kinerja Tahun 2020-2024.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	10
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	10
1. Sasaran Kegiatan 1.....	10
2. Sasaran Kegiatan 2	11
3. Sasaran Kegiatan 3	13
4. Sasaran Kegiatan 4.....	15
B. Capaian Output Kegiatan	15
1. Indikator Output Kegiatan 1.....	16
2. Indikator Output Kegiatan 2.....	16
3. Indikator Output Kegiatan 3.....	18
C. Analisis Efisiensi.....	18
D. Kinerja Lainnya.....	19
E. Akuntabilitas Keuangan	19
F. Penggunaan Sumber Daya Manusia	20
Bab IV Penutup.....	22
A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022.....	22
B. Rencana Tindak Tahun 2023	23

Lampiran – Laporan Kinerja Struktural Rokumasi.....	- 1 -
A. Capaian Kinerja Bagian Peraturan Perundang-undangan	- 1 -
1. Koordinator Peraturan Perundang-undangan	- 1 -
2. Subkoordinator Penyusunan Peraturan.....	- 2 -
3. Subkoordinator Dokumentasi, Publikasi, dan Evaluasi Peraturan.....	- 3 -
B. Capaian Kinerja Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum	- 3 -
1. Koordinator Penelaahan dan Bantuan Hukum.....	- 3 -
2. Subkoordinator Penelaahan Hukum	- 5 -
3. Subkoordinator Bantuan Hukum	- 6 -
C. Capaian Kinerja Bagian Komunikasi dan Informasi.....	- 7 -
1. Koordinator Komunikasi dan Informasi	- 7 -
2. Subkoordinator Komunikasi Publik	- 8 -
3. Subkoordinator Informasi Publik	- 11 -

Daftar Tabel

Tabel 1 - Target Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi 2020-2024	7
Tabel 2 - Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022.....	8
Tabel 3 - Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2020-2022	10
Tabel 4 - Pertanyaan Survey dan Nilainya.....	14
Tabel 5 - Output Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022	16
Tabel 6 - Realisasi Dana Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022	19
Tabel 7 - Realisasi Penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022	20

Daftar Grafik

Grafik 1 - Nilai Indeks Reputasi BPKP Tahun 2022.....	12
Grafik 2 - Posisi BPKP Dalam Peta Reputasi Tahun 2022.....	12
Grafik 3 - Rincian Unsur Nilai Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi 2022 .	13

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban. Capaian kinerja Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 yang terdiri dari empat sasaran kegiatan telah melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan.

Kinerja yang tinggi tersebut didukung oleh SDM yang kompeten, komitmen tim, koordinasi baik dengan pihak terkait, dan tersedianya SOP layanan.

Selain kinerja dari target yang telah diperjanjikan secara formal, Biro Hukum dan Komunikasi telah meraih berbagai penghargaan dari pihak eksternal dan internal. Penghargaan yang telah diraih oleh Biro Hukum dan Komunikasi terkait dengan Warta Pengawasan, media sosial, pengelolaan JDIH, badan publik informatif, dan juara kompetisi sintesis data hasil pengawasan.

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang sudah baik ini, rencana tindak ke depan yang akan dilakukan Biro Hukum dan Komunikasi adalah dengan meningkatkan kompetensi di bidang hukum, evaluasi layanan, penyusunan kebijakan turunan dari SK Satgas Pengelolaan Reputasi, identifikasi SOP yang dibutuhkan sekaligus pemutakhirannya, serta meningkatkan fitur dalam laman JDIH BPKP.



**PENGELOLA JDIH NASIONAL TERBAIK V TAHUN 2022
KATEGORI LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN**

Bab I Pendahuluan

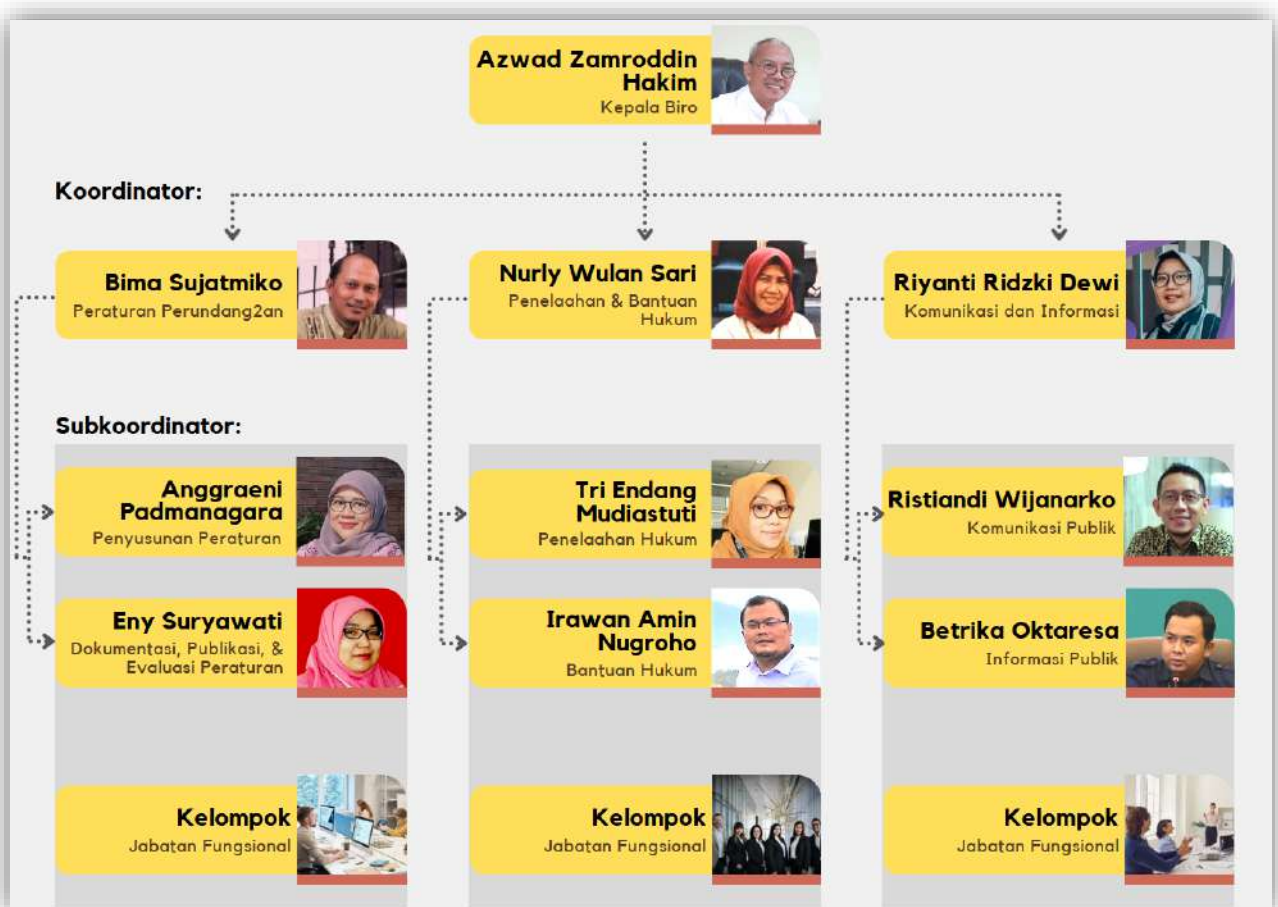
A. Tugas dan Fungsi

Biro Hukum dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi hukum dan perundang-undangan serta komunikasi dan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pelayanan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak, dan nota kesepahaman.
- 2) Pembinaan dan pelayanan dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi dan publikasi serta evaluasi peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembinaan dan pelayanan penelaahan dan pemberian pendapat hukum.
- 4) Pembinaan dan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.
- 5) Pembinaan dan peranan penyuluhan hukum.
- 6) Pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi.
- 7) Pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik.

B. Struktur Organisasi



Biro Hukum dan Komunikasi terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Peraturan Perundang-undangan, Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum, serta Bagian Komunikasi dan Informasi.

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelayanan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak, dan nota kesepahaman serta dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi, publikasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan internal BPKP dan perjanjian/kontrak/nota kesepahaman dan penyiapan bahan dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi, publikasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Koordinator dan terdiri dari:

- 1) Subbagian Penyusunan Peraturan, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis, perancangan, penyusunan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian/kontrak/nota kesepahaman.
- 2) Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan Evaluasi Peraturan, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan dokumentasi, pemberian informasi dan publikasi, serta evaluasi peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelayanan penelaahan dan pemberian pendapat hukum, pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penelaahan hukum dan pemberian pendapat hukum dan penyiapan bahan pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum.

Bagian Penelaahan dan Bantuan hukum dipimpin oleh seorang Koordinator dan terdiri dari:

- 1) Subbagian Penelaahan Hukum, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan dan pemberian pendapat hukum.
- 2) Subbagian Bantuan Hukum, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum.

3. Bagian Komunikasi dan Informasi

Bagian Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi dan informasi internal dan eksternal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi internal, publik dan antarlembaga dan penyiapan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik internal dan eksternal.

Bagian Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Koordinator dan terdiri dari:

- 1) Subbagian Komunikasi Publik, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi internal, publik, dan antarlembaga.
- 2) Subbagian Informasi Publik, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik internal dan eksternal.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berada langsung di bawah setiap subkoordinator yang memiliki tugas secara spesifik sesuai dengan subbagiannya masing-masing.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Biro Hukum dan Komunikasi berjumlah 58 orang. Adapun rincian statistik pegawai adalah sebagai berikut:

1) Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai laki-laki sebanyak 22 orang dan pegawai perempuan sebanyak 36 orang.

2) Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA sebanyak 2 orang, D III sebanyak 17 orang, Sarjana (D IV/S 1) sebanyak 27 orang dan Pasca Sarjana (S 2) sebanyak 12 orang.

3) Jabatan

Berdasarkan jabatan, pegawai PNS sebanyak 54 orang, dengan jabatan struktural sebanyak 10 orang, fungsional sebanyak 44 orang. Selain itu, Tenaga ahli (TA) yang bekerja di Biro Hukum dan Komunikasi sebanyak 4 orang.

4) Golongan

Berdasarkan golongan PNS, pegawai golongan II sebanyak 15 orang, golongan III sebanyak 31 orang, dan golongan IV sebanyak 8 orang.

D. Aspek Strategis Organisasi

Biro Hukum dan Komunikasi memiliki aspek strategis yang dapat dibagi menjadi aspek strategis *Protection* dan *Branding*. Aspek *Protection* memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang memadai kepada seluruh pegawai BPKP ketika menjalankan tugas mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan pemerintah. Aspek proteksi sangat penting karena tugas dan fungsi yang dijalankan BPKP memiliki risiko inheren berupa tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hasil pengawasan yang telah BPKP sampaikan kepada *stakeholders*. Aspek proteksi memastikan bahwa struktur kelembagaan, kebijakan, maupun pelaksanaan operasi kegiatan BPKP telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, aspek *Branding* memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh *stakeholders* BPKP bahwa BPKP telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen dalam memastikan bahwa setiap program pemerintah mencapai tujuan. Aspek

Branding juga mengamplifikasi peran BPKP dalam mendukung upaya pembangunan reputasi pemerintah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pengelolaan aspek *Protection* dan *Branding* ini lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Kepala BPKP nomor KEP-310/K/SU/2021 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

E. Kegiatan dan Layanan

Layanan yang disediakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi adalah:

- a. Bidang Peraturan Perundang-undangan
 - 1) *Legislative/legal drafting*.
 - 2) Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian/kontrak/nota kesepahaman.
 - 3) Dokumentasi peraturan dalam JDIIH BPKP dan Warga BPKP.
- b. Bidang Penelaahan dan Bantuan Hukum
 - 1) Pemberian pendapat hukum.
 - 2) Penanganan perkara.
 - 3) Pemberian konsultasi hukum.
 - 4) Penyuluhan hukum.
 - 5) Ekspose intern dan ekstern.
 - 6) Pendampingan hukum.
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi
 - 1) Layanan informasi publik (PPID BPKP).
 - 2) Layanan pengaduan publik (BPKP Kawal, SP4N LAPOR, dan kanal komunikasi lainnya).
 - 3) Liputan dan dokumentasi.
 - 4) Publikasi tingkat BPKP Pusat (*website*, media sosial, siaran pers, Warta Pengawasan)
 - 5) Manajemen isu.

F. Sistematika Laporan

Laporan kinerja Biro Hukum dan Komunikasi mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

- a) BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tugas dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis organisasi dan sistematika laporan.
- b) BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan target kinerja tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja tahun 2022.
- c) BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan capaian kinerja tahun 2022, analisis efisiensi, kinerja lainnya, akuntabilitas keuangan, dan penggunaan sumber daya manusia.
- d) BAB IV Penutup



**FGD TAHAPAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI
DI KOMISI INFORMASI (atas)
WORKSHOP PROTEKSI DAN BRANDING BPKP (bawah)**

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Target kinerja periode jangka menengah Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan BPKP nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP. Target kinerja tersebut disajikan dalam tabel 1 yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target per tahun sepanjang periode Renstra dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1 - Target Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Tahunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	Indeks (Skala 1-5)	3,15	3,15	3,16	3,16	3,17
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	70	72	74	76	78
3	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP (1)	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen	n/a	70	70	72	73
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi (2)	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,68	8,69	8,69	8,71	8,72

- (1) Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP” merupakan Sasaran Kegiatan yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, sehingga tidak terdapat dalam Renstra BPKP 2020-2024 dengan target tahun 2021 sebesar 70%. Untuk mengakomodasi sasaran kegiatan baru tersebut, target tahun 2021 s.d. 2024 ditetapkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2021 dengan nilai 70%, 71%, 72%, 73% untuk tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 secara berurutan. Namun dalam Perkin tahun 2022, target sasaran kegiatan ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 70%, sehingga target target dalam periode Renstra menyesuaikan target Perkin 2022.
- (2) Target IKK Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi” tahun 2022 pada Renstra BPKP adalah 8,70, namun berdasarkan Perkin 2022 target tersebut sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 8,69, sehingga target dalam periode Renstra menyesuaikan target Perkin 2022.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2 - Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan	Indeks (Skala 1-5)	3,16
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	2.1 Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	74
3	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	3.1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,69 ¹⁾
4	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	4.1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen	70 ²⁾

Sebagaimana telah di atas, terdapat dua target Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2022 yang berbeda dari target dalam Renstra/yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

- 1) Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi (target Perkin 8,69 sedangkan target Renstra 8,70).
- 2) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan (target Perkin 70 sedangkan target yang telah ditetapkan sebelumnya 71).

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Komunikasi, target kinerja yang digunakan adalah target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, target Renstra disesuaikan mengikuti target Perjanjian Kinerja seperti disajikan dalam Tabel 3 Bab III Akuntabilitas Kinerja.







**BADAN PUBLIK INFORMATIF TERBAIK TAHUN 2022
KATEGORI LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN**

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Biro Hukum dan Komunikasi memiliki empat sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan empat indikator kinerja kegiatan (IKK) guna mengukur kinerja Biro. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, keempat indikator kinerja tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Target, realisasi dan capaian kinerja kegiatan tahun 2022 Biro Hukum dan Komunikasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 - Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2020-2022

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Kinerja Kegiatan											Status
				Target					Realisasi			Capaian (%)			
				'20	'21	'22	'23	'24	'20	'21	'22	'20	'21	'22	
1	2	3	4	5					6			7=6/5			8
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan	Indeks (Skala 1-5)	3,15	3,15	3,16	3,16	3,17	3,13	4,44	4,44	99,37	140,95 (120%)	140,51 (120%)	
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	2.1 Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	70	72	74	76	78	71	73,35	75,43	101,43	101,88	101,93	
3	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	3.1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,68	8,69	8,69 1)	8,71	8,72	8,73	8,36	8,74	100,58	96,20	100,58	
4	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	4.1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen		70	70 2)	72	73		96,30	98,65		137,57 (120%)	140,93 (120%)	

- 1) Target Indikator Kinerja Kegiatan sasaran kegiatan 3: “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” menggunakan target Perkin 2022 (8,69), tidak menggunakan target Renstra (8,70).
- 2) Target Indikator Kinerja Kegiatan sasaran kegiatan 4 yaitu “Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP” menggunakan target Perkin 2022 (70), tidak menggunakan target yang telah ditetapkan sebelumnya (71).

Adapun uraian dan analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” diukur dari satu IKK, yaitu “Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan” dengan target tahun 2022 sebesar 3,16. Target tersebut meningkat 0,01 dari target tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kualitas reformasi birokrasi BPKP Tahun 2021 oleh Kementerian PAN RB, diketahui bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPKP (RB) adalah 85,75 dengan kategori A, meningkat dari tahun 2020 dengan nilai 85,03. Namun demikian, dalam hasil evaluasi tahun 2021 tersebut tidak terdapat rincian lebih detail mengenai Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan. Oleh karena itu, untuk kepentingan laporan kinerja ini nilai RB 2021 tetap menggunakan nilai RB deregulasi kebijakan tahun 2020 sebesar 4,44 atau 140,51% dari target tahun 2022. Dengan capaian tersebut, realisasi kinerja 2022 telah melebihi target tahun 2022 dan 2024 sekaligus. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2022 sama dengan realisasi kinerja tahun 2020.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja tersebut. Faktor pendukung tercapainya target kinerja adalah adanya koordinasi dengan unit kerja pemrakarsa serta koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

- 1) Penyusunan Daftar Perencanaan Penyusunan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2022, dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KEP-22/K/SU/2022 tentang Penetapan Daftar Perencanaan Penyusunan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2022.
- 2) Identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tindak sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus serta revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat.
- 3) Selama tahun 2022, telah dilakukan identifikasi, analisis dan/atau revisi dalam proses *legislative drafting* terhadap 17 (tujuh belas) rancangan Peraturan BPKP dan pada akhir tahun 2022 telah ditetapkan oleh Kepala BPKP dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebanyak 6 (enam) Peraturan BPKP. Selain itu juga dilakukan proses identifikasi dan analisis pada penyusunan rancangan Peraturan Sekretaris Utama dan Peraturan Deputi.
- 4) Pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan yang mudah diakses oleh publik melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui website JDIH BPKP.

Pencapaian kinerja yang telah melebihi target tak lantas membuat berpuas diri. Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kompetensi teknis hukum seperti penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan peraturan perundangan-undangan bagi Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Diklat Fungsional Peraturan Perundang-undangan bagi Fungsional Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
- 2) Melakukan kegiatan identifikasi, analisis, pemetaan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.
- 3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.

2. Sasaran Kegiatan 2

Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi berpesan bahwa tugas, fungsi, dan layanan dari pemerintah tidak hanya disampaikan, tetapi juga telah diterima oleh penggunanya, "tidak hanya *sent*, tapi juga *delivered*". Terkait dengan hal tersebut, dalam kesempatan berbeda, Presiden juga berpesan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib membangun reputasi pemerintah, yang nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden tersebut, BPKP terus berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk hadir dan memberikan manfaat kepada publiknya. Atas upaya tersebut, tentu BPKP perlu mengukur bagaimana penilaian dari publiknya, untuk memastikan tidak ada *gap* antara persepsi dan ekspektasi publik terhadap BPKP, atau disebut dengan pengelolaan reputasi. Sebagai bagian dari pengelolaan reputasi yang dilakukan oleh BPKP, BPKP telah membangun Indeks Reputasi BPKP. Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi publik BPKP, atau disebut dengan masyarakat reputasi BPKP. Atas pengelolaan hubungan yang dilakukan BPKP dengan masyarakat reputasinya, BPKP telah menetapkan indikator-indikator pada setiap tahapan, yaitu tahapan *inputs*, *outputs*, *outtakes*, dan *outcomes*.

Indeks Reputasi BPKP merupakan alat ukur pada tingkatan *outcomes*, yaitu penilaian yang diberikan oleh masyarakat reputasi BPKP atas upaya pengelolaan hubungan yang telah dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan survei kepada masyarakat sasaran (masyarakat reputasi BPKP), yang terbagi menjadi masyarakat umum, media massa, kelompok atau organisasi masyarakat, dan mitra kerja BPKP. Survei dilaksanakan selama 10 hari kerja, mulai tanggal 4 sampai dengan 25 November 2022. Sebanyak 4.003 masyarakat menjadi responden survei tahun 2022 atau naik 31,11% atau 950 responden dibandingkan tahun 2021 (3.023 responden). Hal ini menunjukkan penguatan pengelolaan hubungan dengan Masyarakat Reputasi BPKP.

Model Indeks Reputasi BPKP memiliki empat variabel yang terdiri dari variabel Kualitas, Kinerja, Tanggung Jawab, dan Daya Tarik. Empat variabel tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 20 indikator yang pada ujungnya dapat menggambarkan posisi tingkat Reputasi BPKP, yang dinilai dari skala 1 sampai dengan 7 dengan gradasi kualitas reputasi sebagai berikut:

1. Bad – 2. Poor – 3. Sufficient – 4. Neutral – 5. Good – 6. Excellent – 7. Superior.

Pada tahun 2022, target Indeks Reputasi BPKP adalah 74 dari skala 100 atau 5,18 dari skala 7. Hasil Indeks Reputasi BPKP tahun 2022 sebesar 5,28 dari skala 7, atau 75,43 dari skala 100. Merujuk pada nilai Indeks Reputasi BPKP tersebut maka BPKP berada pada kategori "*Excellent*". Dengan demikian, capaian Indeks Reputasi BPKP tahun 2022 sebesar 101,93% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target Indeks Reputasi BPKP tahun 2024 sebesar 78, maka realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai 96,71%. Realisasi Indeks Reputasi BPKP dari tahun 2020 hingga kini pun terus mengalami peningkatan. Realisasi Indeks Reputasi BPKP tahun 2022 ini naik 2,08 atau 2,84% dari

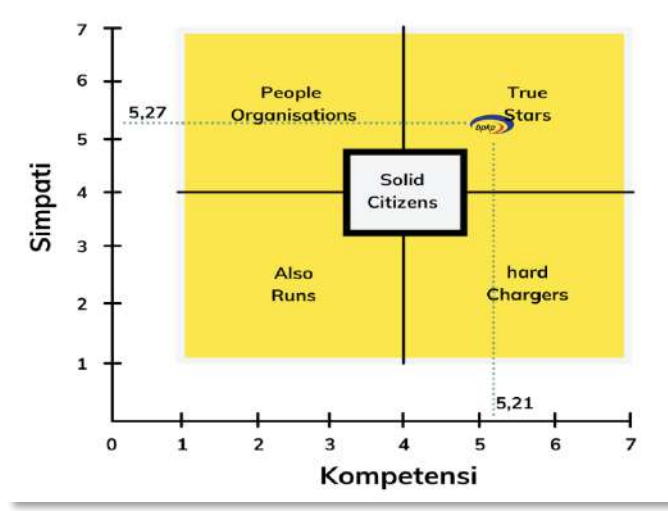
realisasi Indeks Reputasi BPKP tahun 2021 yaitu 73,35 yang naik 2,35 atau 3,31% dari realisasi Indeks Reputasi BPKP tahun 2020.

Grafik 1 – Nilai Indeks Reputasi BPKP Tahun 2022



Analisis atas penilaian dari Masyarakat Reputasi BPKP juga dapat diukur melalui pemetaan reputasi, dengan mengukur posisi BPKP dalam dua variabel yaitu kompetensi dan simpati. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka BPKP berada di posisi "TrueStars". Posisi ini menunjukkan bahwa BPKP telah dinilai oleh Masyarakat Reputasi menjadi organisasi yang telah difokuskan tidak hanya pada pencapaian kinerjanya saja tetapi juga diimbangi dengan terus mempromosikan nilai-nilai humanis dalam aktivitas yang dilakukan.

Grafik 2 – Posisi BPKP Dalam Peta Reputasi Tahun 2022



Faktor pendukung tercapainya kinerja dalam meningkatkan reputasi BPKP adalah koordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPKP. Hal ini dikarenakan pengelolaan identitas dan citra yang kolaboratif diperlukan untuk mengurangi *gap* antara fakta dan citra yang dipersepsikan oleh masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kinerja, diantaranya adalah penyusunan Strategi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (SPIK) Tahun 2022, kampanye program, *agenda setting* bulanan, pengelolaan *owned* media BPKP, serta pengelolaan layanan informasi.

Pencapaian kinerja yang telah melebihi target tak lantas membuat berpuas diri. Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah menyusun kebijakan turunan dari SK Satgas Reputasi melalui BPKP SPIK yang merujuk pada kekuatan pengaruh dari empat variabel reputasi (kualitas, kinerja, tanggung jawab, dan daya tarik) serta memetakan pembagian tanggung jawab pengelolaan identitas dan citra berdasarkan proses bisnis dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing unit kerja sebagai *process owner*.

Disamping itu, guna penguatan pengelolaan reputasi maka peningkatan kompetensi SDM pengelola kehumasan melalui *workshop*, konsultasi dan pelatihan perlu dilakukan. Begitupula *Focus Group Discussion* dengan pakar dan akademisi perlu dilakukan guna mengevaluasi dan mempertajam kebijakan pengelolaan reputasi.

3. Sasaran Kegiatan 3

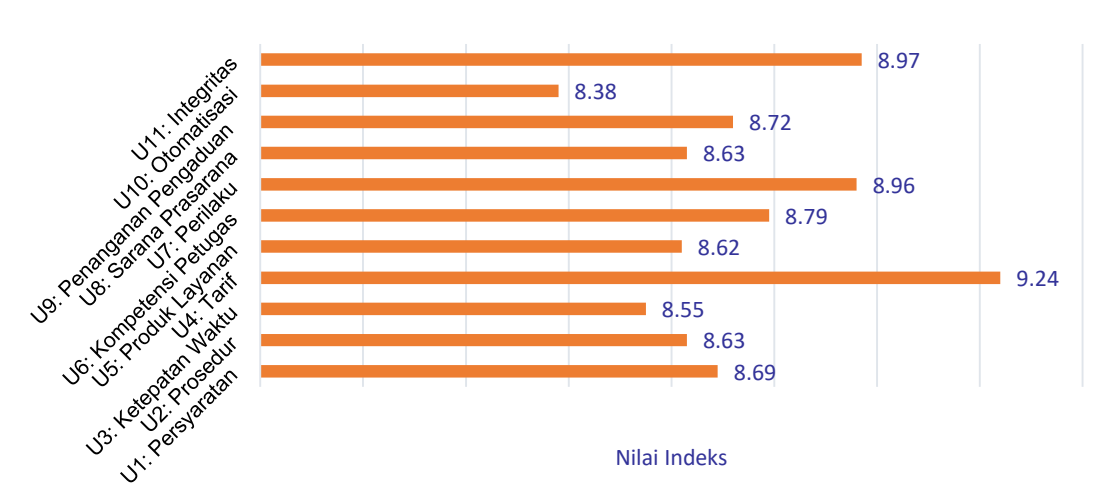
a. Umum

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” diukur dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” dengan target nilai tahun 2022 sebesar 8,69. Pelaksanaan survei Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022 dilakukan pada periode 24–27 November 2022 yang berasal dari tiap unit kerja di lingkungan BPKP yang pernah menerima layanan dari Biro Hukum dan Komunikasi. Guna mengetahui bagaimana publik internal BPKP menilai kepuasan terhadap pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi, survei telah dilaksanakan dengan responden sejumlah 143 publik internal BPKP. Survei dilakukan terhadap 11 aspek, yaitu: Persyaratan, Prosedur, Ketepatan Waktu, Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Petugas, Perilaku, Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Otomatisasi dan Integritas Pelayanan.

b. Hasil Survey

Berdasarkan hasil survei, nilai Indeks Kualitas Layanan (IKL) Biro Hukum dan Komunikasi adalah 8,74 atau mencapai 100,58% dari target tahun 2022 sebesar 8,69.

Grafik 3 – Rincian Unsur Nilai Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi 2022



Adapun rincian pertanyaan survey dan nilai indeksnya masing-masing disajikan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4 – Pertanyaan Survey dan Nilainya

No	Unsur	Indikator		Nilai (Skala 1-10)
1	2	3		4
I	Persyaratan	1	Persyaratan yang harus Anda penuhi untuk mendapatkan layanan telah sesuai dengan persyaratan yang telah diinformasikan.	8,69
II	Prosedur	2	Prosedur pelayanan mudah dipahami dan diterapkan.	8,63
III	Ketepatan Waktu	3	Jangka waktu pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan	8,55
IV	Tarif	4	Pegawai tidak pernah memungut biaya atau keuntungan ekonomi lainnya dalam memberikan pelayanan.	9,24
V	Produk Layanan	5	Pengelolaan reputasi BPKP di bidang proteksi (layanan hukum) dan branding (layanan kehumasan) telah sesuai dengan harapan Anda	8,62
VI	Kompetensi Petugas	6	Pegawai memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam memberikan pelayanan.	8,79
VII	Perilaku	7	Pegawai melayani Anda dengan sopan dan ramah.	8,96
VIII	Sarana dan Prasarana	8	Sarana dan prasarana yang disediakan telah mendukung pemberian layanan.	8,63
IX	Penanganan Pengaduan	9	Pegawai menanggapi pengaduan dengan cepat, tepat dan jelas.	8,72
X	Otomatisasi	10	Kecepatan respon, kemudahan fitur, dan kualitas konten pada website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) atau website Layanan Informasi Publik (e-PPID) BPKP telah sesuai dengan harapan Anda.	8,38
XI	Integritas Pelayanan	11	Pegawai telah mengedepankan prinsip transparansi dan menghindari perilaku KKN dalam memberikan pelayanan.	8,97
Rata-rata				8,74

Berdasarkan hasil survei pada Tabel 4, nilai Indeks Kualitas Layanan (IKL) Biro Hukum dan Komunikasi adalah 8,74 atau 100,58% dari target IKL 2022 sebesar 8,69. Nilai IKL sebesar 8,74 masuk dalam kategori “setuju” yang menunjukkan bahwa secara umum responden telah merasa puas dengan layanan yang telah diberikan oleh Biro Hukum dan Komunikasi sepanjang tahun 2022. Nilai tersebut pun meningkat 0,38 dari realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 8,36. Jika dibandingkan dengan target IKL Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2024 sebesar 8,72, maka realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai 100,23%.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja, diantaranya adalah melakukan evaluasi atas hasil survei kualitas layanan tahun 2022, mengadakan rapat internal guna meningkatkan kualitas layanan, serta melakukan revisi pernyataan pada kuesioner survei kualitas layanan. Tercapainya kinerja tentu terdapat faktor pendukungnya, seperti sumber daya manusia yang kompeten dan tersedianya/pemutakhiran SOP layanan.

Rencana tindak ke depan sebagai upaya untuk mempertahankan capaian yang baik sekaligus meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu layanan Biro Hukum dan Komunikasi.
- 2) Menyusun dan/atau memutakhirkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibutuhkan.
- 3) Melengkapi peraturan pada JDIH dan menambah menu “tematik” untuk melihat hubungan antar peraturan, baik peraturan yang lebih tinggi atau lebih rendah, maupun peraturan internal atau eksternal.

4. Sasaran Kegiatan 4

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan diukur dari jumlah dokumen pendapat hukum dan dokumen penanganan perkara yang diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP, dengan realisasi sebagai berikut:

- 1) Pendapat Hukum.

Permintaan pendapat hukum tahun 2022 sebanyak 37 pendapat hukum dan dapat dipenuhi sebanyak 36 pendapat hukum atau 97,29%.

- 2) Berkas Perkara di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berkas yang harus disampaikan ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 103 berkas perkara dan dapat dipenuhi sebanyak 103 berkas perkara atau 100%.

Dengan demikian, realisasi kinerja Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan tahun 2022 yaitu 98,65% $((97,29\% + 100\%)/2)$. Nilai tersebut meningkat 2,35 % dari realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 96,30%. Realisasi kinerja tersebut jauh melebihi target 2022 yang telah ditetapkan sebesar 70% atau persentase capaian kinerjanya sebesar 140,93%. Jika dibandingkan dengan target persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan tahun 2024 sebesar 73%, maka realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai 135,14%.

Realisasi kinerja tahun 2022 yang melebihi target dicapai dengan berbagai upaya, diantaranya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui diklat maupun *focus group discussion* (FGD) dengan narasumber yang kompeten. Komitmen tim juga menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah rutin melakukan FGD/diskusi/*workshop* dengan mengundang narasumber yang kompeten dan mengusulkan diklat untuk peningkatan kompetensi SDM.

B. Capaian Output Kegiatan

Output Kegiatan sesuai dengan RKA Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 sebanyak tiga indikator output kegiatan (IOK) dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 – Output Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022

No	Indikator Output Kegiatan (IOK) RKA/DIPA	Satuan	Output		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	15	100
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	30	100
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Laporan	31	31	100

Dari tabel 5 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Output Kegiatan 1

IOK “Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Realisasi *output* sebanyak 15 kegiatan atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) I.
- 2) Penyusunan himpunan peraturan BPKP tahun 2021.
- 3) Penyusunan analisis dan deskripsi peraturan perundang-undangan I.
- 4) Penyusunan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP I.
- 5) Evaluasi pengelolaan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) I.
- 6) Abstrak peraturan perundang-undangan I.
- 7) Penyusunan analisis pembahasan perjanjian/kontrak/MoU I.
- 8) Harmonisasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan I.
- 9) Penyusunan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP II.
- 10) Evaluasi pengelolaan peraturan perundang-undangan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) II.
- 11) Penyusunan analisis pembahasan perjanjian/kontrak/MoU II.
- 12) Abstrak peraturan perundang-undangan II.
- 13) Evaluasi pengelolaan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) I
- 14) Analisis dan Deskripsi Peraturan Perundang-undangan II
- 15) Harmonisasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan II

2. Indikator Output Kegiatan 2

IOK “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah Laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan.

Realisasi *output* sebanyak 30 laporan atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- 1) Pendapat hukum terkait peraturan yang digunakan dalam menentukan tingkat solvabilitas PT ASABRI.
- 2) Pendapat hukum terkait klaim atas proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi *engineering, procurement, construction, and commissioning* (EPCC) pengembangan dan modernisasi PG *assembagoes* Situbondo.
- 3) Pendapat hukum terkait penugasan revidi atas perhitungan hak dan kewajiban atas pengakhiran perjanjian kerja sama aset tetap berupa tanah di lokasi Jl. RE Martadinata/Jl. Gunung Sahari Jakarta Utara pada PT PLN (Persero).
- 4) Pendapat hukum terkait pengangkatan ke dalam JFA.
- 5) Pendapat hukum terkait pelaksanaan jual beli aset gedung dan tanah PT Rekayasa Industri di Kalibata.
- 6) Penanganan perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Smd di PN Sumedang.
- 7) Penanganan perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN.Smd di PN Sumedang.
- 8) Penanganan perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PN.Smd di PN Sumedang.
- 9) Penanganan perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PN.Smd di PN Sumedang.
- 10) Pendapat hukum terkait perhitungan piutang pokok, nilai tambah dan denda dalam rangka penyelesaian piutang Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
- 11) Pendapat hukum terkait rencana revidi *business plan* dan kompensasi atas penyelenggaraan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) jalan tol KM 19 jalur B ruas tol Jakarta-Cikampek.
- 12) Pendapat hukum terkait potensi gugatan hukum atas laporan hasil pemeriksaan PNPB pada proyek Palapa Ring Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 13) Pendapat hukum terkait penerapan skema *passthrough* dalam pengusaha pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur.
- 14) Penanganan sengketa informasi publik Nomor 003/II/KIP-JIB/PSI/2022 di Komisi Informasi Provinsi Jambi.
- 15) Penanganan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN/Smd di PN Sumedang.
- 16) Penanganan perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN/Smd di PN Sumedang.
- 17) Penanganan perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Lbo di Limboto.
- 18) Pendampingan pemberian keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta.
- 19) Pendapat Hukum atas Ketentuan terkait Program Perlindungan Sosial.
- 20) Pendapat Hukum terkait Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka monitoring P3DN dan pada Kementerian Kesehatan.
- 21) Pendapat Hukum terkait *Letter of Authorization* (LoA) dan *Power of Attomey* (PoA) dalam Pengadaan Senjata 30 mm pada Badan Pengamanan Laut (BAKAMLA) TA 2022.
- 22) Pendapat Hukum terkait Perbedaan Interpretasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 23) Pendapat Hukum atas Klausul Penggunaan Peraturan Pemerintah yang Telah Dicaput dalam IUPK Operasi Produksi PT Freeport Indonesia.
- 24) Pendapat Hukum atas Rencana Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Pusat Statistik.
- 25) Penanganan perkara perdata Nomor 304/Pdt.G/2021/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram.
- 26) Penanganan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN/Rbg di Pengadilan Negeri Rembang.
- 27) Pendapat Hukum atas Hasil Audit Operasional Pembangunan Bendungan Ladongi Paket I (MYC) Tahun Anggaran 2016 s.d 2021 pada SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV Kendari.
- 28) Pendapat Hukum terkait Klausul Penyesuaian Harga dalam Kontrak Paket *Rolling Stock of Mass Rapid Transit* Jakarta *Project* pada PT MRT Jakarta (Perseroda).
- 29) Penanganan Perkara/Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 44/G/2022/PTUN.MTR di PTUN Mataram.

- 30) Konsultasi hukum terkait Penugasan Reviu Penyediaan BTS dan Infrastruktur Pendukungnya Tahun 2022 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Indikator Output Kegiatan 3

IOK "Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi" diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang dihasilkan.

Realisasi *output* sebanyak 31 kegiatan atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- 1) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Januari 2022.
- 2) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Januari 2022.
- 3) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Januari 2022.
- 4) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Februari 2022.
- 5) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Februari 2022.
- 6) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Februari 2022.
- 7) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Maret 2022.
- 8) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Maret 2022.
- 9) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan April 2022.
- 10) Laporan monitoring pengelolaan website BPKP Triwulan I Tahun 2022.
- 11) Laporan kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan I Tahun 2022
- 12) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan April 2022
- 13) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan April 2022
- 14) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan April 2022
- 15) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Mei 2022
- 16) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik Mei 2022.
- 17) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Mei 2022
- 18) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Juni 2022
- 19) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik Juni 2022.
- 20) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Juni 2022
- 21) Laporan monitoring pengelolaan website BPKP Triwulan II Tahun 2022.
- 22) Laporan kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan II Tahun 2022.
- 23) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Juli 2022.
- 24) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Juli 2022.
- 25) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Agustus 2022
- 26) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Agustus 2022.
- 27) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan September 2022.
- 28) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan September 2022.
- 29) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Oktober 2022.
- 30) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan November 2022.
- 31) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan November 2022.

C. Analisis Efisiensi

Dalam upayanya mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, Biro Hukum dan Komunikasi telah efisien dalam menggunakan sumber daya keuangan (*well spending*). Hal ini terlihat dari seluruh capaian kinerja kegiatan yang telah melebihi 100% (dapat dilihat pada Tabel 3) serta capaian indikator output kegiatan yang telah mencapai 100% (dapat dilihat pada Tabel 9), lebih besar dari total persentase realisasi belanja sebesar 99,86% (dapat dilihat pada Tabel 10).

Dari perspektif penggunaan sumber daya manusia, terlihat bahwa IKK pada bagian Peraturan Perundang-undangan dan bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum telah cukup efisien

menggunakan sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari IKK nilai RB Deregulasi Kebijakan serta IKK Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terselesaikan mencapai 140,51% dan 139% (dapat dilihat pada Tabel 3) lebih besar dibandingkan dengan penggunaan sumber daya manusianya, yaitu masing-masing 103,53% dan 102,32% (dapat dilihat pada Tabel 11).

Sedangkan pada bagian Komunikasi dan Informasi, walaupun persentase realisasi penggunaan sumber daya manusia (104,33% - Tabel 11) lebih besar daripada capaian IKK Indeks Reputasi 101,93% (Tabel 3) dan Indeks Kualitas Layanan 100,58%, tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai tidak efisien. Hal ini karena banyaknya layanan yang diminta oleh unit-unit kerja *stakeholders* internal maupun pihak eksternal atas layanan kehumasan, yang menghabiskan banyak sumber daya manusia untuk memenuhinya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kehumasan Biro Hukum dan Komunikasi telah diakui dan sangat dibutuhkan oleh *stakeholders*.

D. Kinerja Lainnya

Selain kinerja yang telah diuraikan di atas, sepanjang periode tahun 2022 Biro Hukum dan Komunikasi juga memperoleh penghargaan-penghargaan baik dari pihak eksternal dan internal, yaitu:

1. *Gold Winner* kategori Lembaga sub kategori Media Cetak (majalah Warta Pengawasan edisi 4/2021) dari PR Indonesia Tahun 2022.
2. *Silver Winner* kategori Lembaga sub kategori Media Sosial dari PR Indonesia tahun 2022.
3. *Bronze Winner* kategori Kanal Digital sub kategori Media Sosial Instagram dari Humas Indonesia.
4. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) nasional Terbaik V tingkat lembaga pemerintah non kementerian tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM.
5. Penghargaan Badan Publik Informatif tahun 2022 dengan nilai 99 dari Komisi Informasi Pusat.
6. Juara 2 Kompetisi Sintesis Data Hasil Pengawasan BPKP 2022.
7. Juara Tercepat dan Tepat Kompetisi Sintesis Data Hasil Pengawasan BPKP 2022.

E. Akuntabilitas Keuangan

Penggunaan dana untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 – Realisasi Dana Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022

No	Indikator Ouput Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	431.200.000	429.016.158	99,49

2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	699.408.000	698.966.882	99,94
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	892.062.000	891.754.183	99,97
Jumlah		2.022.670.000	2.019.737.223	99,86

Dari total anggaran sebesar Rp2.022.670.000, realisasi belanja sebesar Rp2.019.737.223 atau sebesar 99,86%. Dengan persentase mendekati 100%, penyerapan anggaran Biro Hukum dan Komunikasi tergolong sangat baik.

F. Penggunaan Sumber Daya Manusia

Realisasi penggunaan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 – Realisasi Penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022

No	Indikator Ouput Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana		
		Rencana (OH)	Realisasi (OH)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	2.635	2.728	103,53
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	2.756	2.820	102,32
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4.874	5.085	104,33
Jumlah		10.265	10.633	103,58

Realisasi penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 sebesar 10.633 OH dari target 10.265 OH atau 103,58%. Hal ini menunjukkan begitu banyaknya permintaan layanan yang dipenuhi oleh Biro, baik dari sisi penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta kehumasan.

Merah putih berkibar di tiang
Penuh khidmat upacara bendera,
BPKP akan terus berjuang
Beri kontribusi terbaik untuk negara



Media Sosial Instagram BPKP
sebagai **Bronze Winner**
Anugerah Humas Indonesia Tahun 2022

2022 GOLD WINNER MEDIA CETAK (PR INDONESIA)
2022 SILVER WINNER MEDIA SOSIAL (PR INDONESIA)
2022 BRONZE WINNER INSTAGRAM (HUMAS INDONESIA)

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Biro Hukum dan Komunikasi telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Secara ringkas capaiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan: 140,51% (maks. 120%).
- 2) Indeks Reputasi BPKP: 101,93%.
- 3) Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi: 100,58%.
- 4) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan: 140,93% (maks. 120%).

Di luar keberhasilan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perkin 2022, Biro Hukum dan Komunikasi juga memiliki kinerja lain berupa penghargaan yang berasal dari pihak eksternal maupun internal, yaitu:

- 1) *Gold Winner* kategori Lembaga sub kategori Media Cetak (majalah Warta Pengawasan edisi 4/2021) dari PR Indonesia Tahun 2022.
- 2) *Silver Winner* kategori Lembaga sub kategori Media Sosial dari PR Indonesia tahun 2022.
- 3) *Bronze Winner* kategori Kanal Digital sub kategori Media Sosial Instagram dari Humas Indoensia.
- 4) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) nasional Terbaik V tingkat lembaga pemerintah non kementerian tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penghargaan Badan Publik Informatif tahun 2022 dengan nilai 99 dari Komisi Informasi Pusat.
- 6) Juara 2 Kompetisi Sintesis Data Hasil Pengawasan BPKP 2022.
- 7) Juara Tercepat dan Tepat Kompetisi Sintesis Data Hasil Pengawasan BPKP 2022.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Biro Hukum dan Komunikasi dalam mencapai kinerja tersebut di tahun 2022 adalah:

- 1) Terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat koordinasi yang baik dengan unit kerja pemrakarsa serta dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Terkait dengan pengelolaan reputasi, adalah koordinasi yang positif dengan unit kerja di lingkungan BPKP. Hal ini dikarenakan pengelolaan identitas dan citra yang kolaboratif diperlukan untuk mengurangi *gap* antara fakta dan citra yang dipersepsikan oleh masyarakat.
- 3) Sumber daya manusia yang kompeten.
- 4) Ketersediaan dan pemutakhiran SOP proses bisnis.

B. Rencana Tindak Tahun 2023

Dengan capaian positif tersebut, Biro Hukum dan Komunikasi tidak lantas berpuas diri. Beberapa rencana tindak yang akan dilaksanakan di tahun 2023 agar Biro dapat memberikan layanan yang lebih baik adalah:

- 1) Peningkatan kompetensi teknis hukum seperti penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan peraturan perundangan-undangan bagi Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Diklat Fungsional Peraturan Perundang-undangan bagi Fungsional Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
- 2) Melakukan kegiatan identifikasi, analisis, pemetaan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.
- 3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.
- 4) Menyusun kebijakan turunan dari SK Satgas Reputasi melalui BPKP SPIK yang merujuk pada kekuatan pengaruh dari empat variabel reputasi (kualitas, kinerja, tanggung jawab, dan daya tarik) serta memetakan pembagian tanggung jawab pengelolaan identitas dan citra berdasarkan proses bisnis dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing unit kerja sebagai *process owner*.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu layanan Biro Hukum dan Komunikasi.
- 6) Menyusun dan/atau memutakhirkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibutuhkan.
- 7) Melengkapi peraturan pada JDIH dan menambah menu “tematik” untuk melihat hubungan antar peraturan, baik peraturan yang lebih tinggi atau lebih rendah, maupun peraturan internal atau eksternal.
- 8) Rutin melakukan Focus Group Discussion (FGD)/diskusi/*workshop* dengan mengundang narasumber di bidang hukum dan kehumasan yang kompeten baik dari praktisi maupun akademisi guna penguatan pengelolaan proteksi hukum dan branding.
- 9) Mengusulkan *workshop*/diklat di bidang hukum dan kehumasan untuk peningkatan kompetensi SDM.

Lampiran – Laporan Kinerja Struktural Rokumasi

A. Capaian Kinerja Bagian Peraturan Perundang-undangan

1. Koordinator Peraturan Perundang-undangan

Nama: Bima Sujatmiko

Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya selaku Koordinator Peraturan Perundang-undangan

Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan	Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB	Skala 1-5	3,16	4,44	140,50% (120%)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks	8,69	8,74	100,58%

Penjelasan

- 1) Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks Reformasi Birokrasi ini diperoleh pada indikator Deregulasi Kebijakan pada penilaian reformasi birokrasi BPKP. Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.
- 2) Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi diperoleh dari hasil survey per tahun atas layanan Biro Hukum dan Komunikasi. Layanan Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan menjadi salah satu dari layanan Biro Hukum dan Komunikasi. Layanan Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan terbagi atas layanan penyusunan peraturan dan layanan dokumentasi/publikasi peraturan.
- 3) Prestasi tahun 2022 yang telah diraih yaitu:
 - a) Mendapatkan nilai indeks reformasi hukum BPKP tahun 2022 sebesar 85.45 (sangat baik) dari Kementerian Hukum dan HAM.
 - b) Website JDih BPKP mendapat predikat terbaik V untuk kategori Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.

Kendala yang Dihadapi

Tidak terdapat fungsional pranata komputer yang secara khusus menangani dan mengelola *website* jdih.bpkp, dari sisi keamanan *website* jdih.bpkp pernah diretas oleh pihak yang tidak

bertanggung jawab dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkan dan memfungsikan kembali *website* jdih.bpkp

Rencana Tindak Lanjut atas Kendala

- 1) berkoordinasi dengan Pusinfowas untuk keamanan *website* jdihbpkp secara berkelanjutan.
- 2) meminta tenaga fungsional pranata komputer untuk menangani jdih.bpkp.

Rencana Aksi Lainnya

- 1) meningkatkan kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundang-undangan pada indeks RB secara terus menerus dan meningkatkan pemenuhan penilaian indeks kualitas kebijakan dan indeks reformasi hukum.
- 2) melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.
- 3) meningkatkan kualitas JDIH.BPKP dengan memperbanyak konten dan materi dalam JDIH.BPKP.

2. Subkoordinator Penyusunan Peraturan

Nama: Anggraeni Padmanagara

Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP	Laporan Semester	Laporan	2	2	100,00%
2	Penyusunan Analisis Pembahasan Perjanjian/Kontrak/MoU	Laporan Semester	Laporan	2	2	100,00%
3	Penyusunan Analisis dan Deskripsi Peraturan Perundang-undangan	Laporan Semester	Laporan	2	2	100,00%

Kendala yang Dihadapi

- 1) Permintaan *legislatif drafting/legal drafting* dari unit kerja tidak menyertakan *soft file* dan narahubung/PIC dari pemrakarsa.
- 2) Sarana prasarana guna mendukung kegiatan belum maksimal (PC tidak disertai kamera sehingga volume sewaktu zoom kadang tidak terdengar).

Rencana Tindak Lanjut atas Kendala

- 1) Mengingatkan kembali unit kerja untuk mengirimkan bahan berupa *soft file*, dengan membuat *link*, dan mencantumkan nama dan nomor HP dari narahubung/PIC unit kerja dan Rokumasi.

- 2) Memberitahukan kebutuhan sarana prasarana melalui Biro Hukum dan Komunikasi untuk diinfokan ke Biro Umum.

3. Subkoordinator Dokumentasi, Publikasi, dan Evaluasi Peraturan

Nama: Eny Suryawati

Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Dokumentasi, Publikasi dan Evaluasi Peraturan

Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional melalui JDIH BPKP	Laporan Semester Website	Laporan	2	2	100,00%
2	Evaluasi Pengelolaan Peraturan Produk Hukum BPKP melalui JDIH BPKP	Laporan Semester Website	Laporan	2	2	100,00%
3	Abstrak Peraturan Perundang-undangan	Laporan Semester	Laporan	2	2	100,00%
4	Himpunan Peraturan BPKP	Himpunan Tahunan	Buku Himpunan	1	1	100,00%
5	Harmonisasi dan pemetaan Peraturan Perundang-undangan	Laporan semester	laporan	2	2	100,00%

Kendala yang Dihadapi

Website jdih.bpkp pernah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Rencana Tindak Lanjut atas Kendala

- 1) Berkoordinasi dengan Pusat Informasi Pengawasan untuk keamanan *website* jdih.bpkp.
- 2) Penambahan menu di jdih.bpkp dan pemutakhiran konten secara tepat waktu.

B. Capaian Kinerja Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum

1. Koordinator Penelaahan dan Bantuan Hukum

Nama: Nurly Wulan Sari

Jabatan: Analis Hukum Ahli Madya selaku Koordinator Penelaahan dan Bantuan Hukum

Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen	70	98,65	140,93% (120%)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks	8,69	8,74	100,58%

Penjelasan

- 1) Meningkatkan kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP dilakukan melalui pemberian bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum. Penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan melalui kegiatan bantuan hukum/penanganan perkara dilaksanakan dengan menganalisa gugatan yang ditujukan terhadap BPKP (perkara perdata, tata usaha negara, sengketa informasi publik), menyusun jawaban atas gugatan, melakukan pembelaan di persidangan, dan menyiapkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Penanganan perkara dilakukan di persidangan tingkat Pertama, tingkat Banding, tingkat Kasasi, dan tingkat Peninjauan Kembali, sehingga proses analisa dan penyusunan pembelaan hukum terhadap produk/tindakan BPKP yang dipermasalahkan dalam setiap gugatan tersebut terus berlangsung sampai Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu, untuk proteksi hukum atas tugas pengawasan juga dilakukan melalui pemberian pendapat hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data-data terkait atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penugasan pengawasan, sehingga mendapatkan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Penanganan perkara maupun pemberian pendapat hukum dilakukan terhadap tugas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2022. Pemberian kajian/pendapat hukum dilakukan dalam rangka meminimalisir risiko hukum atas tugas pengawasan yang dilakukan BPKP.
- 2) Meningkatkan kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi pada Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum, selain dilakukan melalui pemberian bantuan hukum dan pendapat hukum, juga dilakukan melalui:
 - a) Pemberian Pendampingan Hukum terhadap pegawai BPKP yang memberikan keterangan sebagai Saksi/Ahli di hadapan Penyidik atau saat persidangan tipikor.
 - b) Pemberian Konsultasi Hukum dilaksanakan guna membantu Unit Kerja BPKP dalam menjawab komplain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap laporan hasil pengawasan BPKP.
 - c) Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan diskusi yang dihadiri Korwas Bidang Investigasi Unit Kerja Perwakilan dan membahas berbagai permasalahan di unit kerja guna meningkatkan proteksi hukum atas hasil pengawasan BPKP, serta menghadirkan narasumber/praktisi yang kompeten.
 - d) Ekspose intern dan ekstern dengan memberikan pendapat hukum berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data-data terkait permasalahan dalam penugasan pengawasan, sehingga dapat memberikan masukan/solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Ekspose dilakukan terhadap tugas pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2022.
 - e) Penyusunan Kompilasi Pendapat Hukum dan Ekspose.

Kendala yang Dihadapi

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia Sarjana Hukum dibandingkan dengan kegiatan Penelaahan dan Bantuan hukum (pendapat hukum, penanganan perkara, pendampingan hukum, konsultasi hukum, dan ekspose).
- 2) Pegawai baru pada Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum belum memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan bantuan hukum/konsultasi hukum/pendampingan hukum/pendapat hukum/ekspose.

Rencana Tindak Lanjut atas Kendala

- 1) Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk mengusulkan rekrutmen/penambahan SDM berlatar sarjana hukum.
- 2) Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Pusdiklatwas untuk pelaksanaan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi Analis Hukum.
- 3) Melaksanakan FGD/*workshop* dengan mengundang narasumber yang kompeten.

2. Subkoordinator Penelaahan Hukum

Nama: Tri Endang Mudiastuti

Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Penelaahan Hukum

Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemberian Pendapat Hukum	Laporan Pendapat Hukum	Laporan	17	17	100,00%
2	Melaksanakan Ekpose Intern dan Ekstern	Dokumen Hasil Ekpose	Dokumen	4	4	100,00%
3	Melaksanakan Kompilasi Pendapat Hukum	Dokumen Kompilasi Pendapat Hukum	Dokumen	4	4	100,00%
4	Melaksanakan Kompilasi Ekpose	Dokumen Kompilasi Ekpose	Dokumen	4	4	100,00%

Penjelasan

- 1) Pemberian pendapat hukum dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data-data terkait atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penugasan pengawasan, sehingga mendapatkan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Pendapat hukum diberikan terhadap tugas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2022. Pemberian kajian/pendapat hukum dilakukan dalam rangka meminimalisir risiko hukum atas tugas pengawasan yang dilakukan BPKP.
- 2) Melaksanakan Ekpose intern dan ekstern dengan memberikan pendapat hukum berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data-data terkait permasalahan dalam penugasan pengawasan, sehingga dapat memberikan masukan/solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Ekspose dilakukan terhadap tugas pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2022.
- 3) Melaksanakan Kompilasi Pendapat Hukum setiap triwulan selama satu tahun.

- Melaksanakan Kompilasi Ekspose setiap triwulan selama satu tahun.

Kendala yang Dihadapi

- Kurangnya Sumber Daya Manusia Sarjana Hukum dibandingkan dengan banyaknya jumlah permintaan pendapat hukum.
- Permintaan pendapat hukum semakin bervariasi karena semakin bervariasinya tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, hal ini kurang seimbang dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai baru pada Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan kajian hukum secara mandiri.

Rencana Tindak Lanjut atas Kendala

- Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk mengusulkan rekrutmen/penambahan SDM berlatar sarjana hukum.
- Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Pusdiklatwas untuk pelaksanaan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi Analis Hukum.
- Melaksanakan FGD/*workshop* dengan mengundang narasumber yang kompeten.

3. Subkoordinator Bantuan Hukum

Nama: Irawan Amin Nugroho

Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Bantuan Hukum

Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penanganan Perkara	Laporan Penanganan Perkara	Laporan	13	16	123,08% (120%)
2	Pendampingan Hukum	Laporan Pendampingan Hukum	Laporan	2	2	100,00%
3	Konsultasi Hukum	Dokumen Konsultasi Hukum	Dokumen	4	5	125,00%
4	Penyuluhan Hukum	Dokumen Penyuluhan Hukum	Dokumen	1	1	100,00%

Penjelasan

- Penanganan Perkara dilaksanakan dengan menganalisa gugatan yang ditujukan terhadap BPKP (perkara perdata, tata usaha negara, sengketa informasi publik), menyusun jawaban atas gugatan, melakukan pembelaan di persidangan, dan menyiapkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Penanganan perkara dilakukan di persidangan tingkat Pertama, tingkat Banding, tingkat Kasasi, dan tingkat Peninjauan Kembali, sehingga proses analisa dan penyusunan pembelaan hukum terhadap produk/tindakan BPKP yang dipermasalahkan dalam setiap gugatan tersebut terus berlangsung sampai Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Pendampingan Hukum dilaksanakan saat pegawai BPKP memberikan keterangan sebagai Saksi/Ahli di hadapan Penyidik atau saat persidangan tipikor.

- 3) Konsultasi Hukum dilaksanakan guna membantu Unit Kerja BPKP dalam menjawab komplain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap laporan hasil pengawasan BPKP.
- 4) Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan diskusi yang dihadiri Korwas Bidang Investigasi Unit Kerja Perwakilan dan membahas berbagai permasalahan di unit kerja guna meningkatkan proteksi hukum atas hasil pengawasan BPKP, serta menghadirkan narasumber/praktisi yang kompeten.

Kendala yang Dihadapi

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia Sarjana Hukum dibandingkan dengan kegiatan bantuan hukum (penanganan perkara, pendampingan, konsultasi hukum).
- 2) Pegawai baru di Bagian Penelahaan dan Bantuan Hukum belum memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan bantuan hukum/konsultasi hukum/pendampingan hukum.

Rencana Tindak Lanjut atas Kendala

- 1) Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk mengusulkan rekrutmen/penambahan SDM berlatar sarjana hukum.
- 2) Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Pusdiklatwas untuk pelaksanaan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi Analis Hukum.
- 3) Melaksanakan FGD/*workshop* dengan mengundang narasumber yang kompeten.

C. Capaian Kinerja Bagian Komunikasi dan Informasi

1. Koordinator Komunikasi dan Informasi

Nama: Riyanti Ridzki Dewi

Jabatan: Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Komunikasi dan Informasi

Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Reputasi BPKP	Indeks Reputasi BPKP	Indeks	74	75,43	101,93%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks	8,69	8,74	100,58%

Penjelasan

- 1) Pada tahun 2022, target Indeks Reputasi BPKP adalah 74 dari skala 100 atau 5,18 dari skala 7. Hasil Indeks Reputasi BPKP tahun 2022 sebesar 5,28 dari skala 7, atau 75,43 dari skala 100. Merujuk pada nilai Indeks Reputasi BPKP tersebut maka BPKP berada pada kategori "Excellent". Dengan demikian, capaian Indeks Reputasi BPKP tahun 2022 sebesar 101,93% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target Indeks Reputasi BPKP tahun 2024 sebesar 78, maka realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai 96,71%. Realisasi Indeks Reputasi BPKP dari tahun 2020 hingga kini pun terus mengalami peningkatan.

Realisasi Indeks Reputasi BPKP tahun 2022 ini naik 2,08 atau 2,84% dari realisasi Indeks Reputasi BPKP tahun 2021 yaitu 73,35 yang naik 2,35 atau 3,31% dari realisasi Indeks Reputasi BPKP tahun 2020.

- 2) Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” diukur dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” dengan target nilai tahun 2022 sebesar 8,69. Pelaksanaan survei Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022 dilakukan pada periode 24-27 November 2022 yang berasal dari tiap unit kerja di lingkungan BPKP yang pernah menerima layanan dari Biro Hukum dan Komunikasi. Guna mengetahui bagaimana publik internal BPKP menilai kepuasan terhadap pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi, survei telah dilaksanakan dengan responden sejumlah 143 publik internal BPKP. Berdasarkan hasil survei, nilai Indeks Kualitas Layanan (IKL) Biro Hukum dan Komunikasi adalah 8,74 atau mencapai 100,58% dari target tahun 2022 sebesar 8,69.

Kendala yang Dihadapi

- 1) *Website* BPKP sempat down karena masalah *routing* pada *server*. Permasalahan ini disebabkan oleh isu teknis saat *server* sedang dipelihara oleh Pusinfowas. Saat ini, aplikasi yang digunakan dalam membangun *website* dan aplikasi *server* yang digunakan sudah terlalu lama *outdated*. Hal ini mengakibatkan munculnya kesulitan dalam proses pemeliharaan.
- 2) Pada layanan pengaduan, tindak lanjut pengaduan oleh unit kerja teknis masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data dari laporan triwulan III pengelolaan pengaduan, yang berhasil ditindaklanjuti adalah 86,36% dari aduan yang masuk (pengaduan, informasi, dan aspirasi).
- 3) Masih terdapat unit kerja yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai strategi pengelolaan reputasi.
- 4) Sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam mengelola reputasi belum optimal.

Rencana Tindak Lanjut atas Kendala

- 1) Revitalisasi *website* bekerja sama dengan Pusinfowas, sehingga mempercepat proses waktu akses *website* dan meningkatkan kenyamanan pengunjung website
- 2) Melakukan PPM kepada tim layanan pengaduan unit kerja terkait proses bisnis dan evaluasi kinerja layanan pengaduan.
- 3) Menyusun kebijakan turunan dari SK Satgas Reputasi melalui BPKP SPIK yang merujuk pada kekuatan pengaruh dari empat variabel reputasi (kualitas, kinerja, tanggung jawab, dan daya tarik)
- 4) Memetakan pembagian tanggung jawab pengelolaan identitas dan citra berdasarkan proses bisnis dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing unit kerja sebagai *process owner*.

2. Subkoordinator Komunikasi Publik

Nama: Ristiandi Wijanarko

Jabatan: Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Komunikasi Publik

Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Layanan pengelolaan <i>website</i> BPKP level Instansi	Laporan Bulanan Website	Laporan	12	12	100,00%
2	Layanan pengaduan	Laporan Triwulan Pengaduan	Laporan	4	4	100,00%
3	Layanan pelaporan kinerja	Laporan Triwulan Kinerja	Laporan	4	4	100,00%
4	Layanan informasi publik level Instansi	Laporan Tahunan PPID	Laporan	1	1	100,00%
5	Layanan pelaporan kinerja dan keuangan PP39	Laporan Bulanan PP39	Laporan	12	12	100,00%
6	Layanan pelaporan branding	Laporan Triwulan <i>Branding</i>	Laporan	4	4	100,00%
7	Layanan kehumasan internal (liputan, <i>content/creative</i> , dokumentasi)	Layanan Kehumasan	Bulan layanan	12	12	100,00%
8	Layanan hubungan antarlembaga, media, dan masyarakat	Layanan Komunikasi Publik	Bulan Layanan	12	12	100,00%

Penjelasan

- 1) Pengelolaan *website* BPKP level Instansi dilakukan dengan memelihara laman website BPKP serta memutakhirkan konten-konten level instansi, seperti halaman utama/depan dan halaman-halaman informasi mengenai BPKP. Selain itu, pengelolaan *website* juga memantau pemutakhiran informasi yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. Capaian kinerja pengelolaan website ini adalah 100% atau 12 laporan.

Jumlah publikasi berita harian (*daily news*) di laman tahun 2022 adalah sebanyak 2.526 berita¹. Delta kenaikan jumlah publikasi berita di laman BPKP tahun 2022, jika dibandingkan dengan tahun 2021 (1.766 berita), mengalami kenaikan 760 berita atau 43,04%, dengan jumlah berita harian yang dipublikasikan rata-rata 6,92 berita per hari². Sementara itu, kunjungan *website* sepanjang tahun 2022³ adalah 1.589.139 *visitors* atau naik 208.729 pengunjung (15,12%) dibandingkan dengan tahun 2021 dengan 1.380.410 pengunjung. Dari data tersebut, terlihat ada korelasi positif penambahan kunjungan dengan naiknya jumlah publikasi melalui *website*. Hal ini menunjukkan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan sepanjang tahun telah berhasil memiliki dampak yang positif terhadap minat masyarakat untuk mencari informasi mengenai BPKP.

- 2) Layanan pengaduan mengumpulkan pengaduan, informasi, dan aspirasi dari masyarakat luas, termasuk internal BPKP. Kanal pengaduan yang dikelola oleh Biro Hukum dan

¹ Data Desember 2022 menggunakan angka ekstrapolasi karena *cut off* data guna keperluan laporan ini adalah sebelum selesainya tahun 2022.

² Rata-rata publikasi harian menggunakan penyebut 365 hari kalender dalam setahun.

³ Data kunjungan *website* menggunakan angka Desember 2021 s.d. November 2022 (*year on year*) karena *cut off* data guna keperluan laporan ini adalah sebelum selesainya tahun 2022.

Komunikasi BPKP adalah SP4N LAPOR, BPKP Kawal, media komunikasi resmi kantor, media sosial BPKP, dan pengaduan secara langsung. Capaian kinerja *output* layanan pengaduan ini adalah 100% atau 4 laporan triwulanan pengaduan sepanjang tahun 2022.

Pengaduan (pengaduan, informasi, dan aspirasi) yang diterima oleh Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 adalah sebanyak 180 pengaduan, naik 56 pengaduan atau 45,16% dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 124 pengaduan. Peningkatan jumlah pengaduan ini membuktikan bahwa kinerja BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pembangunan telah mendapat kepercayaan masyarakat, sehingga publik mengandalkan BPKP dalam menindaklanjuti kebutuhan/permasalahan yang mereka miliki.

- 3) Layanan pelaporan kinerja merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan kepada Biro Hukum dan Komunikasi. Capaian kinerja *output* ini adalah 100% atau 4 laporan triwulanan di tahun 2022.

Adapun data statistik kinerja rata-rata waktu layanan informasi publik tahun 2022 adalah 2,35 hari, lebih cepat 2,33 hari atau 50,18% dari rata-rata waktu layanan di tahun 2021 yang berada di angka 4,68 hari. Dari sisi kepuasan pengguna layanan, juga terlihat kenaikan tingkat kepuasan dari 4,46 (skala 5) di tahun 2021 ke angka 4,54 di tahun 2022 atau ada kenaikan sebesar 1,79%. Dari data tersebut terlihat korelasi positif meningkatnya rata-rata waktu layanan informasi dengan tingkat kepuasan pengguna layanan. Hal ini menunjukkan tim layanan informasi telah bekerja sangat baik dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik BPKP.

- 4) Layanan informasi publik memberikan informasi publik yang dimiliki oleh BPKP ketika diminta oleh pemohon informasi. Namun demikian, pengelolaan informasi publik memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mulai dari merencanakan keterbukaan informasi publik, koordinasi dengan unit terkait baik internal maupun eksternal, pelaksanaan kegiatan layanan, hingga pelaporan dan evaluasi atas pengelolaan layanan informasi publik. Capaian kinerja *output* ini adalah 100% atau satu laporan tahunan layanan informasi publik. Di tahun 2022, layanan informasi publik BPKP mendapatkan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat, dengan nilai 99 berbagi peringkat pertama dengan Bank Indonesia.
- 5) Layanan pelaporan kinerja dan keuangan PP39 memberikan informasi terkait kinerja output kegiatan dan keuangan secara bulanan ke dalam aplikasi PP39 Bappenas. Capaian kinerja *output* ini adalah 100% atau 12 laporan.
- 6) Layanan pelaporan *branding* adalah *monitoring* atas kegiatan *branding* yang dilakukan oleh seluruh unit kerja BPKP dalam meningkatkan reputasi BPKP secara keseluruhan. Di tahun 2022 ini, laporan kinerja *branding* dilebur ke dalam capaian kinerja reputasi BPKP. Capaian kinerja *output* ini adalah 100% atau 4 laporan triwulanan sepanjang tahun 2022.
- 7) Layanan kehumasan internal meliputi layanan dokumentasi foto dan video, penyediaan *Master of Ceremony*, pembuatan berita untuk pimpinan BPKP, pembuatan desain visual, pembuatan video *branding* BPKP, dan sejenisnya. Capaian kinerja *output* ini adalah 100% atau 12 bulan layanan.
- 8) Layanan hubungan antarlembaga, media, dan masyarakat merupakan salah satu aspek layanan kunci dari Biro Hukum dan Komunikasi karena layanan ini memberikan impresi secara langsung kepada *stakeholders* eksternal BPKP. capaian kinerja *output* ini adalah 100% atau 12 bulan layanan.

Sepanjang tahun 2022 jumlah siaran pers yang diterbitkan adalah sebanyak 32 berita, atau naik 1 berita (3,23%) dibandingkan dengan tahun 2021 (31 berita), dan telah melampaui target yang ditetapkan pada BPKP SPIK yaitu 2 berita per bulan atau 24 siaran pers dalam satu tahun.

Kendala yang Dihadapi

- 1) *Website* BPKP sempat down karena masalah *routing* pada *server*. Permasalahan ini disebabkan oleh isu teknis saat *server* sedang dipelihara oleh Pusinfowas. Saat ini, aplikasi yang digunakan dalam membangun *website* dan aplikasi *server* yang digunakan sudah terlalu lama *outdated*. Hal ini mengakibatkan munculnya kesulitan dalam proses pemeliharaan.
- 2) Pada layanan pengaduan, tindak lanjut pengaduan oleh unit kerja teknis masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data dari laporan triwulan III pengelolaan pengaduan, yang berhasil ditindaklanjuti adalah 86,36% dari aduan yang masuk (pengaduan, informasi, dan aspirasi).
- 3) Pengelolaan hubungan media (*media handling*), melalui pemberitaan siaran pers dan konferensi pers pada unit kerja Perwakilan belum berjalan optimal sehingga publikasi belum teramplifikasi maksimal.

Rencana Tindak Lanjut atas Kendala

- 1) Melakukan revitalisasi *website* BPKP bersama dengan Pusinfowas.
- 2) Melakukan PPM kepada tim layanan pengaduan unit kerja terkait proses bisnis dan evaluasi kinerja layanan pengaduan.
- 3) Melakukan pembinaan kepada unit kerja Perwakilan baik melalui konsultasi langsung maupun melalui PPM mengenai hubungan media.

3. Subkoordinator Informasi Publik

Nama: Betrika Oktaresa

Jabatan: Pranata Humas Ahli Muda selaku Subkoordinator Informasi Publik

Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Reputasi BPKP	Pengelolaan Media Sosial BPKP	Jumlah Konten	1.600	2.266	141,63% (120%)
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	Pengelolaan Daily News Website BPKP	Jumlah Berita	1.500	2.526	168,40% (120%)
3	Meningkatnya Reputasi BPKP	Pengelolaan Manajemen Isu	Jumlah Isu	150	194	129,33% (120%)
4	Meningkatnya Reputasi BPKP	Pengelolaan Majalah Warta Pengawasan	Majalah	4	4	100,00%
5	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Layanan Administrasi Keuangan	Bulan Layanan	12	12	100,00%

Penjelasan

- 1) Pengelolaan media sosial BPKP dilakukan dengan publikasi konten pada platform media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube yang dikelola secara resmi oleh BPKP. Pada tahun 2022, dengan target 2 konten per hari sesuai dengan SK Satgas Reputasi BPKP, atau 1.600 konten per tahun, dapat direalisasikan sebanyak 2.266 konten (141,63%).

Realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan utamanya disebabkan oleh diterbitkannya Strategi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP atau BPKP SPIK 2022, yang secara langsung memperluas ruang gerak dalam publikasi yang dilakukan terutama dari sisi substansi apa yang dapat dipublikasikan. Selain itu, pada 28 Oktober 2022, Pengelolaan Media Sosial BPKP mendapatkan penghargaan *Bronze Winner* dari Humas Indonesia.

- 2) Pengelolaan *Daily News Website* BPKP dilakukan dengan proses penyaringan dan penyuntingan atas konsep pemberitaan yang dikirimkan oleh unit kerja di lingkungan BPKP dan pemberitaan yang disusun oleh tim bagian Kominfo BPKP. Pada tahun 2022, dengan target 2-4 konten per hari sesuai dengan BPKP SPIK 2022, atau 1.500 konten per tahun, dapat direalisasikan sebanyak 2.526 konten (168,40%). Realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan utamanya disebabkan oleh diterbitkannya Strategi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP atau BPKP SPIK 2022, yang mendorong unit kerja terutama perwakilan BPKP untuk memberitakan aktivitas pengawasan di wilayah masing-masing. Di sisi lain, kemampuan penulisan berita di unit perwakilan semakin baik sehingga semakin tinggi peluang konsep berita dapat diterima di tahapan penyaringan.
- 3) Pengelolaan manajemen isu BPKP dilakukan dengan proses identifikasi dan analisis isu secara harian yang nantinya dikompilasi dalam laporan mingguan manajemen isu BPKP. Pada tahun 2022, dengan target 3 isu per minggu, atau 150 isu per tahun, dapat direalisasikan sebanyak 194 isu (129,33%). Realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan utamanya disebabkan oleh semakin terkoordinasinya tim manajemen isu di bagian Kominfo BPKP dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
- 4) Pengelolaan Warta Pengawasan BPKP dilakukan secara berkala selama satu tahun dengan menerbitkan satu edisi untuk masing-masing triwulannya. Proses redaksi dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu penentuan tema, pembagian PIC per rubrik, pengumpulan atau penulisan artikel, penyuntingan, dan proses pembuatan *layout*. Setelah dilakukan reviu maka proses finalisasi dilakukan dengan pengunggahan pada laman *website* BPKP dan pencetakan untuk edisi cetaknya.
- 5) Pengelolaan layanan administrasi keuangan dilakukan secara harian dalam rangka pengelolaan anggaran yang ada di Bagian Komunikasi dan Informasi BPKP. Pada tahun 2022, jumlah anggaran yang dikelola setelah beberapa kali dilakukan revisi adalah Rp.892.062.000 atau turun 5,01% dari anggaran tahun 2021. Jika dibandingkan tahun 2019, bahkan penurunannya mencapai 26,90% atau senilai Rp.328.203.000.

Kendala yang Dihadapi

- 1) Kesulitan dalam mencari penulis artikel terutama yang berasal dari internal BPKP sebagai kontributor Majalah Warta Pengawasan BPKP.
- 2) Pegawai baru di Bagian Komunikasi dan Informasi belum memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan manajemen isu.
- 3) Jumlah anggaran yang terus berkurang menyebabkan Bagian Kominfo kesulitan dalam melakukan pembinaan langsung ke unit kerja terutama di Perwakilan BPKP.

Rencana Tindak Lanjut atas Kendala

- 1) Secara berkala membuat pengumuman di lingkungan internal BPKP untuk mengajak para insan BPKP dan pengumuman di berbagai media komunikasi publik BPKP untuk publik eksternal BPKP, agar berkontribusi menyampaikan tulisan-tulisannya setiap H-1 bulan sebelum masa penyusunan Majalah Warta Pengawasan BPKP (setiap Februari, Mei, Agustus, dan Oktober).

- 2) Melakukan PPM terkait Implementasi Manajemen Isu guna mempersempit *gap* kompetensi yang dibutuhkan.
- 3) Melakukan analisis kebutuhan anggaran yang terukur dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan baik dari sisi biaya produksi publikasi dan biaya pembinaan ke unit kerja perwakilan BPKP.

Rencana Aksi Lainnya

- 1) Pada Triwulan 1 Tahun 2023 akan dilakukan FGD dengan berbagai pihak guna melakukan pendalaman atas Hasil Pengukuran Indeks Reputasi BPKP Tahun 2022.
- 2) Finalisasi Strategi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP tahun 2023 (BPKP SPIK 2023).